

Ragam Modal Perempuan Perdesaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim di Tengah Subordinasi

Variety of Rural Women's Capital Against Climate Change in the Midst of Subordination

Widya Hasian Situmeang¹ dan Fairuz Rafidah Aflaha²

Program Studi Teknologi Produksi dan Pengembangan
Masyarakat Pertanian, Sekolah Vokasi IPB¹ dan Yeungnam University²
Jalan Kumbang Nomor 14, RT 02 RW 06, Babakan,
Kecamatan Bogor Tengah, Bogor, Jawa Barat 16128¹ dan
Daehak-Ro, Gyeongsan, Gyeongbuk 38541, Republic of Korea²
widyahasian21@apps.ipb.ac.id¹ dan fraflaha@gmail.com²

Kronologi Naskah: diterima 16 November 2022, direvisi 30 November 2022, diputuskan diterima 5 Desember 2022

Abstract

Climate change causes the emergence of various phenomena in social life. This phenomenon has a tendency to increase uncertainty over the fulfillment of food, clean water needs, health, to the household economy in various communities in rural Indonesia. Women and children are the vulnerable groups who bear more of the burden of climate change. In reality, women are indirectly required to be able to strategize to meet family needs in the midst of the vulnerability of life due to climate change. The strong patriarchal pressure on Indonesian society makes the role of women often invisible and not taken into account in seeking household resilience, especially in rural and coastal areas. This paper aims to identify the characteristics and raise the story of rural and coastal women in Indonesia in the face of climate change. Another thing identified in this study is the variety of strategies used by women, as well as the challenges of subordination they experience. This study was conducted using a literature study method as well as collecting qualitative field findings on the experiences of women facing climate change in various regions in Indonesia. This study draws on the literature from 2010 to 2020 and compares it with field findings on the experiences of women in rural and coastal areas in Java and East Nusa Tenggara in the period 2019 – 2022. The results show that rural and coastal women are proven to continue to carry out various adaptation strategies that tends to be dominated by social capital in facing the challenges of climate change even though its role is not taken into account as a struggle within the community.

Keywords: rural, women, climate change, coastal, capital

Abstrak

Perubahan iklim menyebabkan kemunculan berbagai fenomena dalam kehidupan bermasyarakat. Fenomena tersebut memiliki kecenderungan meningkatkan ketidakpastian atas pemenuhan pangan, kebutuhan air bersih, kesehatan, hingga perekonomian rumah tangga di berbagai komunitas di perdesaan Indonesia. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok rentan yang menanggung beban lebih atas perubahan iklim tersebut. Pada kenyataannya, perempuan menjadi pihak yang secara tidak langsung dituntut untuk dapat berstrategi memenuhi kebutuhan keluarga di tengah kerentanan hidup akibat perubahan iklim. Kuatnya tekanan patriarki pada masyarakat Indonesia menjadikan peran perempuan acap kali tidak terlihat dan tidak diperhitungkan dalam mengupayakan resiliensi rumah tangga, terutama di wilayah perdesaan dan pesisir. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan mengangkat kisah perempuan perdesaan dan pesisir Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Hal lain yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah ragam strategi yang digunakan perempuan, serta tantangan subordinasi yang dialami. Kajian ini dilakukan dengan metode studi literatur serta mengumpulkan temuan lapangan secara kualitatif atas pengalaman perempuan menghadapi perubahan iklim di berbagai wilayah di Indonesia. Kajian ini mengangkat literatur dari rentang tahun 2010 hingga 2020 dan membandingkannya dengan temuan lapangan atas pengalaman perempuan di perdesaan dan pesisir di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur pada rentang 2019–2022. Hasil penelitian menunjukkan, perempuan perdesaan dan pesisir terbukti terus melakukan beragam strategi adaptasi yang cenderung didominasi oleh modal sosial dalam menghadapi tantangan perubahan iklim meskipun perannya tidak diperhitungkan sebagai perjuangan dalam komunitas.

Kata kunci: modal, perdesaan, perempuan, perubahan iklim, pesisir

Pendahuluan

Setiap generasi yang terlahir ke dunia pasti menghadapi krisisnya masing-masing. Bagi generasi saat ini, salah satu krisis besar yang dihadapi adalah perubahan iklim. Menurut Direktorat Jenderal Pengendalian

Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2017), perubahan iklim merujuk kepada perubahan signifikan kepada iklim, suhu udara dan curah hujan mulai dari dasawarsa

sampai jutaan tahun. Kondisi tersebut terjadi karena meningkatnya konsentrasi gas karbondioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Lebih lanjut lagi, perubahan iklim juga dapat diartikan sebagai satu perubahan keadaan rata-rata iklim atau variabilitasnya secara signifikan dalam satu periode yang panjang (dekade atau lebih lama lagi). Dampak perubahan iklim begitu besar dan dapat ditemukan di berbagai aspek kehidupan. Menurunnya kualitas air, berkurangnya kuantitas air, perubahan habitat, punahnya spesies, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan, meningkatnya gas rumah kaca, berkurangnya area pertanian, dan menurunnya produktivitas pertanian adalah sedikit contoh dari masifnya dampak yang terjadi.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (2022) mengemukakan bahwa perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pada dasarnya, pergeseran ini terjadi secara alami, seperti yang dapat diamati melalui variasi siklus matahari. Akan tetapi, dengan tumbuhnya industrialisasi yang dimulai sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi salah satu penyebab krisis ini. Pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas yang banyak digunakan di seluruh dunia menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut yang menyelubungi bumi. Emisi tersebut menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu.

Kondisi bumi pada sepuluh tahun terakhir 1,1°C lebih hangat dibandingkan tahun 1800-an dengan rekor terpanas terjadi pada tahun 2011 hingga 2020. Apabila tak diatasi, dampak bencana seperti kekeringan dan banjir akan semakin parah, terutama pada kelompok rentan. Terkait dengan hal ini, PBB menuturkan bahwa penduduk pulau kecil dan negara berkembang dapat dikategorikan ke dalam kelompok rentan. Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan intrusi air asin telah meningkat ke titik hingga seluruh komunitas harus pindah. Selain itu, kekeringan yang berkepanjangan dapat menimbulkan kelaparan di sejumlah wilayah rawan. Di masa depan, jumlah "pengungsi iklim" diperkirakan akan meningkat (PBB 2022).

Kemudian, apabila ditelaah lebih dalam lagi, dalam kelompok-kelompok rentan yang tersebar di seluruh dunia, perempuan menjadi pihak yang sangat terdampak. Dari segi sosio-ekonomi, pada umumnya perempuan mengalami subordinasi, yakni suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain (KPPPA

2022). Perubahan iklim memperparah posisi tersebut. Tak hanya subordinasi, perempuan juga mengalami ketidakadilan gender yang berdampak pada kerentanan yang berbeda saat menghadapi perubahan iklim. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim (API) yang *Responsif Gender*. Publikasi yang diterbitkan tahun 2015 ini memuat strategi integrasi gender dalam API, program API yang meliputi program sektoral dan kegiatan pokok, serta tata laksana mulai dari pengorganisasian, mekanisme, dan *monitoring* dan evaluasi API. Melalui panduan ini, KPPPA menekankan bahwa dalam hal potensi krisis lingkungan akibat perubahan iklim, relasi sosial antara laki-laki dan perempuan menjadi timpang karena perbedaan pengalaman laki-laki dan perempuan selama dan setelah krisis perubahan iklim. Ketimpangan gender ini melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender salah satunya adalah beban ganda. Sebagai contoh, pada komunitas pertanian, cuaca yang tidak menentu menimbulkan gagal panen. Untuk dapat tetap menyokong kebutuhan keluarga, perempuan petani akan mencari sumber pendapatan lain di daerah asal sambil mengurus pekerjaan domestik sementara laki-laki petani bermigrasi untuk mencari pekerjaan lain. Terlebih lagi, perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam akan menimbulkan kerusakan infrastruktur dan hukum serta meningkatkan kompetisi terhadap pangan dan sumber daya lainnya. Apabila bencana alam ini menimpa masyarakat yang di dalamnya masih ditemukan diskriminasi terhadap perempuan maka perempuan menjadi lebih rentan dan dapat menjadi korban bencana yang berujung pada kematian.

Di antara dampak-dampak perubahan iklim yang terjadi, krisis pangan dan air bersih merupakan ancaman yang dirasakan oleh kelompok rentan khususnya perempuan dan anak-anak. Krisis pangan telah meningkatkan angka malnutrisi pada anak-anak serta angka kematian ibu dan anak. Sementara krisis air bersih juga berkontribusi terhadap angka kematian anak-anak sebesar 34,6% di negara-negara di dunia ketiga. Sekitar 5 juta anak setiap tahunnya meninggal karena penyakit diare sebab krisis air bersih tersebut. Meskipun demikian, pengalaman-pengalaman perempuan yang dituangkan ke dalam studi-studi terdahulu memperlihatkan kegigihan kaum perempuan dalam upayanya merespons berbagai persoalan yang muncul karena pengaruh perubahan iklim. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan istilah kaum perempuan sebagai "agen perubahan" (*agent of change*) (Oxfam Canada dalam Latifa A. & Fitranita 2013).

Perempuan di wilayah perdesaan dan pesisir memiliki dampak berlapis akibat perubahan iklim. Studi yang dilakukan Arham & Adiwibowo (2022) misalnya, menyatakan bahwa dampak perubahan iklim pada tahun 2019 di Pulau Jawa terasa sangat signifikan terutama dengan upaya penyediaan pangan. Beberapa variabel yang mengalami perubahan secara signifikan di antaranya: peningkatan suhu udara, perubahan curah hujan, dan iklim ekstrem yang menyebabkan kekeringan. Beberapa komunitas pesisir Jawa juga merasakan dampak perubahan iklim berupa abrasi dan banjir rob akibat kenaikan muka air laut (Sunarti & Apriliasari 2015). Akbar et al. (2017) menyatakan akibat perubahan iklim, kecelakaan nelayan saat melaut mengalami peningkatan dan berkaitan erat dengan kemiskinan yang terjadi di komunitas nelayan.

Menurut Kaho (2021) pada paparannya tentang perubahan iklim dan kebencanaan di Nusa Tenggara Timur, tahun 2020 hingga 2021. Terdapat peningkatan risiko kebencanaan yang signifikan di berbagai titik di Nusa Tenggara Timur akibat naiknya suhu bumi secara global. Berbagai risiko bencana tersebut, misalnya banjir, kekeringan, hingga kebakaran hutan. Pada dasarnya, wilayah Nusa Tenggara Timur memang relatif lebih kering dibandingkan wilayah Indonesia lainnya. Namun, perubahan iklim secara signifikan telah menggeser jumlah bulan basah dan bulan kering sehingga berdampak signifikan bahkan ekstrim pada penyediaan pangan dan kebencanaan.

Dengan demikian, penelitian ini hendak mengelaborasi dampak perubahan iklim terhadap perempuan di wilayah perdesaan dan pesisir di wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur dengan perspektif ekofeminisme dan ragam modal sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan mengangkat kisah perempuan perdesaan dan pesisir Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Hal lain yang diidentifikasi dalam kajian ini adalah ragam strategi yang digunakan perempuan, serta tantangan subordinasi yang dialami.

Metodologi Penelitian

Kajian ini mengangkat literatur dari rentang tahun 2010 hingga 2020 dan membandingkannya dengan temuan lapangan atas pengalaman perempuan di perdesaan dan pesisir di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur pada rentang 2019–2022. Hasil penelitian menunjukkan, perempuan perdesaan dan pesisir terbukti terus melakukan beragam strategi adaptasi yang cenderung didominasi oleh modal sosial dalam

menghadapi tantangan perubahan iklim meskipun perannya tidak diperhitungkan sebagai perjuangan dalam komunitas.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dari sumber-sumber reliabel serta himpunan dari temuan lapang di beberapa komunitas masyarakat di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur. Terdapat sebelas literatur yang menjadi rujukan pada metode studi literatur. Sebelas literatur ini terbit dalam jangka waktu 2010 hingga 2020. Masing-masing literatur dianalisis keterkaitannya dengan subordinasi untuk ditemukan persamaan pola di dalamnya.

Adapun temuan lapangan berasal dari pengalaman kualitatif bersama kelompok perempuan Tapawallabadi di Kota Waingapu, Sumba Timur, NTT dan Komunitas nelayan pesisir Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Data pada hasil pengalaman lapangan ini dikumpulkan dalam rentang waktu 2019–2022. Pemilihan lokasi dilakukan secara insidental, bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan lain yang berkaitan dengan penggalian pengalaman komunitas terhadap pemenuhan pangan dan tantangan iklim yang dihadapi. Adapun data yang dikumpulkan berfokus pada pengalaman perempuan dalam menghadapi perubahan iklim selama kurun waktu 4 tahun terakhir hingga 2022. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada 5 informan kunci untuk lokasi penelitian masing-masing. Pemilihan informan kunci dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan pada komunitas yang tengah menghadapi tantangan perubahan iklim dalam pemenuhan pangan keluarga.

Indikasi Perubahan Iklim di Pulau Jawa dan NTT

Sejak tahun 1900, peningkatan suhu yang terjadi di Indonesia mencapai 0,3°C disertai dengan penurunan curah hujan tahunan sebesar dua sampai dengan tiga persen selama seratus tahun terakhir (Hulme & Sheard dalam Latifa & Fitranita 2013). Akan tetapi, penurunan curah hujan tersebut berbeda antar daerah. Di Indonesia bagian selatan terjadi penurunan curah hujan (seperti di Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara), sedangkan peningkatan curah hujan dapat ditemukan di bagian utara Indonesia (seperti di hampir sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi Utara (Boer & Faqih dalam Latifa & Fitranita 2013).

Pusat Penelitian dan Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI) mengemukakan bahwa pada tahun 2010–2011, daerah pertanian dan

perikanan di Kabupaten Lamongan termasuk rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi yang dirasakan masyarakat di wilayah perikanan adalah musim yang tidak menentu sehingga nelayan kesulitan untuk menentukan waktu melaut. Akibatnya, frekuensi melaut berkurang dan hasil tangkapan pun menurun. Perempuan menanggapi situasi ini dengan ikut terjun pada ruang-ruang produktif, meskipun pada akhirnya pilihan untuk menyiasati kurangnya pemasukan rumah tangga berujung pada beban ganda yang harus ditanggung: peran domestik yang tidak berkurang, ditambah dengan peran produktif yang juga diemban.

Sementara itu di wilayah pertanian, musim yang tidak menentu membuat petani kesulitan menentukan musim tanam Padi dan Palawija. Berbagai jenis penyakit seperti potong leher Padi juga timbul dan mengakibatkan produksi padi menurun (Latifa & Fitranita 2013). Beberapa petani laki-laki kemudian memutuskan untuk mencari mata pencaharian lain, salah satunya menjadi tenaga kerja migran atau TKI. Dari hasil wawancara yang dilakukan Latifa & Fitranita (2013) diperoleh informasi bahwa petani-petani yang pergi ke luar daerah untuk mencari nafkah tidak rutin mengirimkan uang kepada para istri. Untuk mengatasi kondisi ini, istri-istri petani terpaksa memutar otak untuk bertahan hidup. Berbeda dengan laki-laki, perempuan cenderung menetap dan melanjutkan hidup di daerah asalnya dengan berstrategi dalam bentuk mencari alternatif pendapatan.

Lebih lanjut lagi, Latifa dan Fitranita (2013) mengungkapkan bahwa akibat perubahan pola hujan tersebut, Pulau Lombok pernah dilanda kekeringan dan hujan ekstrem pada tahun 2010 dan 2011. Akibatnya, sektor perkebunan coklat dan tembakau yang menjadi komoditas utama di wilayah ini menurun drastis. Ramadhani dan Hubeis (2020) menuturkan bahwa pertanian tanaman pangan dan hortikultura tergolong ke dalam sub sektor yang paling rentan terhadap perubahan pola curah hujan karena tanaman hortikultura umumnya merupakan tanaman semusim yang relatif sensitif terhadap kelebihan dan kekurangan air. Kerentanan ini sangat berhubungan dengan sistem penggunaan lahan, sifat tanah, pola tanam, teknologi pengelolaan tanah, air, tanaman, dan varietas.

Bencana alam akibat perubahan iklim juga melanda Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2007, desa ini mengalami tanah longsor dan tahun 2012, banjir besar terjadi dan menghanyutkan tiga siswi SMP. Tragedi ini mendorong petani Desa Gekbrong untuk

melakukan gerakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Inisiatif ini menginspirasi banyak pihak sehingga Desa Gekbrong ditunjuk sebagai satu-satunya desa di Jawa Barat yang layak menjadi desa percontohan dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2013 (Ramadhani & Hubeis 2020).

Mustangin (Al-Farisi et al. 2020) meneliti krisis iklim, gender, dan kerentanan perempuan petani di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Merujuk pada profil kerentanan iklim kabupaten dan tren kebencanaan, wilayah Karanganyar termasuk wilayah terdampak. Hasil pengamatan BMKG Stasiun Klimatologis Semarang yang bekerja sama dengan Stasiun Klimatologi PUSLITBANG FP-UNS Jumantono mengungkapkan bahwa Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan tren suhu rata-rata sebesar 0,017% per tahun dan kenaikan tren curah hujan 0,03% per tahun. Fenomena ini membuat rumah tangga petani terdampak tidak hanya secara fisik namun juga situasi sosial. Apabila ditelaah lebih dalam lagi, kelompok-kelompok terdampak meliputi kelompok petani, kelompok perempuan, perempuan kepala keluarga, kelompok anak-anak, disabilitas, dan kelompok pekerja informal.

Indikasi perubahan iklim juga ditemukan di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Darmawati (2019) mengemukakan lima indikator perubahan iklim di Desa Larangan, yakni pola hujan yang tidak teratur, peningkatan suhu udara, perubahan ketersediaan air di musim kemarau, dan kerusakan tanaman budi daya. Adapun dampak dari pola hujan yang tidak teratur adalah turunnya hujan tidak dapat diprediksi dan terlambat dari perkiraan awal memasuki bulan penghujan. Sementara itu, peningkatan suhu udara berdampak pada suhu udara yang semakin panas serta dapat memicu terjadinya cuaca panas ekstrem. Dalam hal perubahan ketersediaan air di musim kemarau, dampak yang dirasakan warga adalah menurunnya kualitas air dan air sumur yang mengandung zat besi. Indikator terakhir yaitu kerusakan tanaman budi daya menyebabkan hama dan kerusakan pada tanaman budi daya.

Studi yang dilakukan Arifah et al. (2021) menceritakan bahwa frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem yang mengakibatkan kekeringan dan banjir akan menjadi ancaman stabilitas pemenuhan pangan dan perekonomian rumah tangga. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian sumber nafkah sehingga daya beli dan konsumsi rumah tangga menurun. Oleh karena itu, petani perempuan terpaksa menyediakan

makanan dengan nutrisi yang lebih rendah dibandingkan keadaan normal. Pada masa krisis, perempuan dan anak perempuan terpaksa mengurangi asupan mereka agar anggota keluarga laki-laki dapat tetap makan dengan porsi normal karena dianggap sebagai 'pencari nafkah utama' (Arifah et al. 2021).

Kisah Subordinasi dan Strategi Adaptasi Perubahan Iklim

Subordinasi yang merupakan salah satu bentuk ketidakadilan gender menjadi isu penting yang harus diatasi. Ketidakadilan gender itu sendiri dikemukakan Fakih (2013) dapat terjadi dalam berbagai bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*), serta sosialisasi ideologi peran gender. Dalam subordinasi yang terkait dengan dampak perubahan iklim, kondisi buruh perempuan menjadi perhatian khusus. Fakih (2013) membagi hak asasi kaum buruh perempuan ke dalam dua kerangka perspektif, yakni berdasarkan sifat kondisional dan struktural. Analisis kondisional terhadap buruh perempuan membahas nasib kaum buruh secara keseluruhan (buruh laki-laki dan perempuan) secara fisik, upah minimum, diskriminasi upah antara buruh laki-laki dan perempuan, kondisi kerja yang menyangkut keselamatan kerja, maupun hak berorganisasi. Adapun analisis struktural melihat hak asasi buruh perempuan dari sudut pandang posisi buruh perempuan dalam keseluruhan struktur formasi sosial.

Perempuan memiliki pengalaman yang berbeda dengan laki-laki dan dalam pemikiran pengarusutamaan gender, salah satu penyebab terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adalah kegagalan memahami pengalaman, aspirasi, dan kebutuhan yang berbeda dalam peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Penyamarataan pengalaman tersebut melahirkan kebijakan diskriminatif, stigma hingga kekerasan yang menyudutkan baik laki-laki dan perempuan pada konteks pembangunan (Wiasti 2017). Pada satu titik, subordinasi menjadi situasi harian yang dihadapi perempuan Indonesia.

Peran signifikan perempuan juga banyak terabaikan karena konstruksi patriarki di masyarakat menempatkan kerja-kerja perempuan baik di ranah domestik, sosial, maupun produktif sebagai bagian yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab perempuan. Ironisnya, peniadaan peran, karya, dan kerja perempuan

ini bahkan dikhotbahkan dari mimbar-mimbar agama (Mulia 2022). Pada akhirnya, legitimasi atas pemikiran yang mengerdilkan peran perempuan di balik bayang-bayang laki-laki menjadi sangat kokoh berakar di masyarakat Indonesia.

Subordinasi pada perempuan, tidak serta-merta membuat perempuan di perdesaan Indonesia berhenti mengambil peran dalam menopang masyarakat untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. Meskipun pada satu sisi, hal ini menunjukkan betapa dalamnya subordinasi tersebut telah terjadi, yaitu ketika perempuan sama sekali tidak lagi mengetahui bahwa dirinya mengalami subordinasi. Berikut adalah beberapa pengalaman para perempuan dari dua wilayah di Indonesia dan strategi yang dilakukan dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus situasi subordinasi yang mereka alami. Temuan lapangan pada tulisan ini lebih dalam akan menceritakan bagaimana subordinasi perempuan membuat kebijakan pembangunan dalam rangka menghadapi perubahan iklim menjadi bias.

Kelompok para Mama dan Musim Lapar di Kabupaten Sumba Timur

Sumba Timur adalah salah satu Kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang merasakan dampak perubahan iklim yang cukup signifikan. Situasi ini diperparah oleh sejarah perubahan pola konsumsi yang dialami masyarakat Sumba Timur selama periode Orde Baru, saat rezim pangan pada waktu itu mendorong beras menjadi komoditas pangan utama. Sumba Timur, memiliki agroekosistem yang sangat berbeda dengan wilayah-wilayah penghasil beras lainnya di Indonesia, seperti Pulau Jawa, Bali dan Sulawesi sehingga budi daya beras secara intensif akan memerlukan banyak intervensi ekologi. Lokasi yang memiliki tingkat kesesuaian yang cukup untuk budi daya beras pun sangat terbatas dan cenderung berkumpul di beberapa hamparan saja (Banjarnahor & Simanjuntak 2016; Killa 2021).

Selain mengalami 'berasnisasi', Sumba Timur dalam catatan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) pada tahun 2013, juga mengalami serangan hama belalang kembara besar-besaran yang bermigrasi dari wilayah Australia menuju ke arah Utara. Saat mencapai wilayah NTT, khususnya wilayah desa Mbatakapidu, ribuan belalang kembara (*migratory locusta*; *locusta migratoria*) menghancurkan ratusan hektare ladang jagung yang sebenarnya hampir memasuki masa panen. Ketika itu, kelaparan hebat pun melanda desa.

Desa Mbatakpidu merupakan gambaran dari situasi kelaparan yang melanda mayoritas desa di Sumba Timur. Menurut KRPK (2013), pemerintah Desa Mbatakpidu pada tahun 2010 kemudian mendorong warga desanya untuk kembali menanam lahan-lahan kosong dan pekarangan dengan beraneka macam umbi-umbian yang pada dasarnya merupakan sumber karbohidrat lokal. Pada periode itu, dibentuk pula kelompok tani perempuan (KWT) Tapawallabadi sebagai wadah bagi para perempuan desa ini untuk mengupayakan penanaman kembali karbohidrat lokal. Kelompok ini kemudian menjadi salah satu pionir upaya perlawanan terhadap kelapangan di Desa Mbatakpidu.

Menurut para Mama yang tergabung dalam kelompok Tapawallabadi pada wawancara yang dilakukan di tahun 2019, sebelum hampir seluruh masyarakat Sumba Timur menjadikan beras sebagai tanaman pangan utama pada kisaran tahun 1998, masyarakat Sumba memiliki sumber karbohidrat yang diperoleh dari umbi-umbian dan palawija seperti jagung. Tanaman pangan ini dibudidayakan di ladang-ladang milik keluarga dan pekarangan. Sebelum perubahan pola konsumsi, perempuan yang memang secara kultural dikonstruksikan untuk peran-peran domestik dapat lebih leluasa menyajikan makanan bagi keluarga mereka dengan mengambil hasil panen dari umbi-umbian dan palawija dari kebun mereka, ataupun yang telah disimpan dalam rumah dari hasil panen sebelumnya.

Situasi berubah ketika beras diperkenalkan menjadi sumber karbohidrat utama: budi daya umbi-umbian di Sumba Timur menjadi menurun, digantikan oleh palawija dan sebagian menjadi padi ladang yang kemungkinan gagal panennya cenderung lebih tinggi dibanding umbi-umbian. Domestikasi umbi-umbian tergantikan oleh tanaman palawija dan umbi-umbian ditinggalkan menjadi komoditas yang tumbuh liar di hutan.

"Kalau sudah musim lapar nona, kita pi (pergi) masuk hutan gali ubi sampai dapat. Setengah mati kita gali ini iwi (ubi gadung). Baru dicuci di sungai berhari-hari untuk dimakan...baru sekarang ini kita olah pekarangan kasih tanam itu ubi. Jadi dekat saja ambil kalau musim lapar. Dorang bilang ini El-Nino yang kasi mundur itu hujan, banyak gagal panen. Baru tidak ada uang untuk beli makan" (Mama F 2019, wawancara Oktober).

Perubahan iklim membuat datangnya hujan dan musim kering menjadi tidak pasti menyebabkan gagal panen sering kali terjadi di Sumba Timur (Oru 2013). Perempuan yang dibebankan aktivitas domestik kemudian harus mencari alternatif sumber pangan hingga ke hutan untuk menggali umbi liar. Situasi ini

membuat perempuan memiliki beban tambahan untuk menghadirkan pangan bagi keluarganya. Sama seperti peran perempuan, sumber karbohidrat lokal ini mulai tersubordinasi menjadi sumber pangan 'kelas dua', yang hanya dicari saat situasi genting. Situasi ini adalah hasil pemikiran penyelesaian masalah pangan yang tidak melihat perempuan dan perannya dalam pengambilan keputusan saat pihak-pihak pengambil keputusan baik di level pemerintahan maupun para donatur saat menjadikan beras sebagai jalan pintas menyelesaikan masalah pangan di Sumba Timur.

"Gali ganyong ini biar kering sekali tidak ada hujan, masih baik tersimpan dalam tanah. Ini sudah yang kita makan. Dia tahan. Biar saja dalam tanah. Nanti kapan perlu, bisa digali. Kita Tapawallabadi rata-rata tanam ini dekat rumah. Sini saya kasi tunjuk nona gali" (Mama F, wawancara Oktober 2019).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh para Mama di Sumba Timur adalah dengan membentuk kelompok, yang mengupayakan kegiatan-kegiatan produktif melalui kelompok, seperti menenun, mengikuti pelatihan, mengurus kebun pangan pekarangan, dan kegiatan lainnya. Tapawallabadi sebagai kelompok perempuan di Sumba Timur menjadi salah satu ruang bagi para perempuan yang awalnya dikonstruksikan hanya memainkan peran domestik, menjadi memiliki ruang untuk menunjukkan eksistensinya. Melalui kelompok ini, kerja para mama dalam mengupayakan pangan keluarga dan upaya penguatan modal finansial melalui tabungan kelompok direkognisi banyak pihak.

"Aktivitas sehari-hari banyak kerja tenun. Pagi-pagi setelah urusan rumah selesai, langsung gulung benang. Setelah itu lanjut siapkan makan siang, baru gulung benang lagi. Sore nanti kasih makan babi dan siram itu kebun di samping. Baru lanjut gulung benang, siapkan makan malam, lalu istirahat sudah" (Mama Y 2019, wawancara Desember).

"Sekarang ada apa-apa kelompok (perempuan) pasti dikasih tahu. Kita dapat banyak panggilan pelatihan. Siapa saja anggota bisa ikut. Di kelompok juga ada tabungan, biar sedikit sedikit, tapi bisa dipakai waktu anak mau sekolah ko, atau mau ada pesta" (Mama K 2020, wawancara Februari).

Melalui kelompok, para Mama membentuk modal sosial di antara para perempuan yang tadinya tidak terlihat dan tidak dipertimbangkan untuk dapat memunculkan diri di ruang publik. Modal sosial ini kemudian membuka jalan untuk meningkatkan modal manusia melalui kesempatan mendapatkan kepercayaan diri untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan

baru yang tadinya tidak diberikan kepada para perempuan yang 'tidak dilihat' ini. Kedua modal tersebut kemudian mendorong pertumbuhan modal finansial dan modal fisik. Modal sosial menjadi pintu keluar menyiasati rendahnya modal alam yang terlanjur menurun sebagai akibat subordinasi yang dialami oleh para perempuan di Sumba Timur.

Mewiwil' Asa Melawan Ombak: Kisah Perempuan di Kota Serang

Berbeda dengan para Mama di Sumba Timur, para perempuan-istri nelayan rajungan di Karangantu, Kota Serang, Provinsi Banten menjadi pekerja keluarga bagi suami mereka yang dikenal sebagai para nelayan rajungan. Hampir seluruh waktu para istri nelayan ini dihabiskan untuk *mewiwil* atau membetulkan jaring rajungan yang akan digunakan para suami mereka melaut menangkap rajungan. Setiap hari, selain melakukan pekerjaan domestik, para istri nelayan rajungan akan memegang benang nilon dan alat bantu *wiwil* untuk membenahi sambungan jaring yang terputus atau terlepas.

"Kalau sudah *ngewiwil* suka lupa waktu nong. Dari selesai masak, urus rumah, lanjut *ngewiwil*. Gitu lagi sampai nanti malam...ya biar bantu si bapak. Kalau ngga ada saya, mana sanggup nong. Kita kan untuk rajungan bisa dibilang banyak-banyakan jaringnya. Kalau mau banyak dapat, ya banyakin jaring" (Ibu N-istri nelayan rajungan 2022, wawancara Agustus).

Selain membantu *mewiwil*, para istri nelayan rajungan berperan sebagai perantara para suami (nelayan) untuk menjual hasil tangkapan rajungan pada bos. Bos adalah pemodal atau tengkulak yang mengambil hasil tangkapan rajungan para nelayan Karangantu, untuk diolah lebih lanjut. Relasi antara para (istri) nelayan dan bos adalah relasi patron-klien. Para istri dapat meminjam, meminta jaring baru, ataupun meminta pertolongan finansial lainnya pada bos, dan sebagai gantinya, mereka terikat secara moral untuk selalu menjual hasil tangkapan pada para bos dengan harga yang telah ditentukan. Biasanya harga yang ditentukan para bos selalu berada di bawah harga pasar.

"Ya memang harga di bos beda (lebih rendah) dengan harga pasar. Tapi saya selalu jual ke bos... iya. Saya yang jual. Si bapak kan sudah melaut. Nanti saya menghubungi si bos... misal nanti butuh jaring, saya tinggal bilang, anak sakit nanti saya bilang juga ke si bos, pinjamin duit sih bos... ini anak saya sakit, gitu. Ya kalau harga lagi jatuh, kita lebih jatuh lagi dapatnya. Tapi nanti tetap bisa minjem ke bos" (Ibu R-istri nelayan rajungan 2022, wawancara September).

Perempuan memainkan peran penting memastikan hasil tangkapan terserap pada pasar yang lebih luas. Situasi yang sama juga terjadi pada hasil kajian Latifa & Fitranita (2013) yang menceritakan bahwa meskipun perempuan disebutkan menanggung beban paling berat dan merupakan kelompok paling menderita akibat perubahan iklim, kelompok ini juga memiliki kemampuan tinggi untuk bertahan hidup menyokong kehidupan rumah tangganya ketika terjadi penurunan pendapatan yang cukup drastis. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan lah yang pada umumnya akan mengabaikan pemenuhan kebutuhan mereka demi mengutamakan kebutuhan keluarga menghadapi tekanan iklim.

"Ibu-ibu di sini ya kalau kapal rajungan pasti *ngewiwil*. Kalau *nggak* ya mana ketutup modal. *Ngewiwil* ini kan *nggak* ada habisnya sepanjang hari gini aja terus" (Ibu N-istri nelayan rajungan 2022, wawancara Agustus).

Peran yang dimainkan oleh istri-istri nelayan ini cukup signifikan. Akan tetapi, lagi-lagi kisah mereka tidak jauh dari kisah subordinasi. Tidak ada program pemerintah atau bantuan yang secara langsung dialamatkan pada istri nelayan karena mereka 'tidak terlihat' dan hanya menjadi tenaga kerja keluarga (Jumiaty 2018, Darmawan et al. 2021). Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan misalnya, tidak secara spesifik menyebutkan perlindungan seperti apa yang diberikan negara pada nelayan perempuan atau pun perempuan yang terlibat dalam rumah tangga nelayan. Pembahasan mengenai perempuan muncul pada bab V tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan, yang menyebutkan pada pasal 45 bahwa pemberdayaan pada nelayan, "...memerhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, rumah tangga Pembudidaya Ikan, dan rumah tangga Petambak Garam...". Adapun kerja perempuan dalam mengolah pascapanen ikan-ikan kecil dan tangkapan sampingan (*bycatch*) nelayan, acap kali diklaim sebagai bentuk partisipasi mereka dalam program-program pemerintah. Padahal upaya para perempuan ini merupakan inisiatif mereka yang mungkin saja merupakan bagian dari siasat atau strategi yang dipilih untuk menopang pemenuhan kebutuhan keluarga. Klaim ini pun tidak disertai dengan insentif yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan modal para perempuan, baik finansial, manusia, sosial, fisik, maupun alam.

"Pelatihan? Belum ada kayaknya. Ada juga ibu-ibu yang masuk KUB (Kelompok Usaha Bersama), tapi itu saya juga tidak tahu apa kegiatannya. Kalau untuk rajungan kita langsung jual saja ke bos, tidak diolah" (Ibu R-istri nelayan rajungan 2022, wawancara Agustus).

Situasi ini sama seperti yang dikemukakan Dewy & Umar (2020) dan Dewy et al. (2012) tentang kritik atas kebijakan iklim nasional yang belum responsif gender. Pemahaman mengenai gender dan perubahan iklim baik pada kementerian di tingkat nasional maupun pemerintah daerah masih lemah. Perempuan hanya dilihat sebagai kelompok rentan yang menjadi target aksi iklim adaptasi sehingga gender dan kata 'perempuan' hanya disematkan untuk menambah kekuatan narasi program yang dilakukan. Kritik lainnya adalah penganggaran kebijakan pemerintah tidak responsif gender. Tidak ada anggaran yang tersedia untuk melakukan studi dampak gender dari kebijakan iklim yang ada, melibatkan pakar gender, dan melakukan upaya mengurangi kerentanan serta ketidaksetaraan gender karena perubahan iklim maupun respons perubahan iklim.

Mayastuti & Sari (2016) dalam kajiannya mengemukakan sebagai pihak yang paling rentan terhadap perubahan iklim, perempuan sering dianggap sebelah mata sebagai pengambil keputusan di ranah domestik maupun publik. Kerentanan dan ketidaknetralan kebijakan pemerintah terhadap hak-hak perempuan harus diatasi salah satunya dengan penyelenggaraan pendidikan adaptasi perubahan iklim.

"Kalau si bapak berangkat, ibu mah banyakin doa aja. Kerasa sih ini semakin *nggak* menentu kapan hujan kapan *nggak*. Biasa si bapak kalau sudah hujan kadang *nggak* jadi berangkat. Tapi kadang juga malah waktu hujan begitu tuh malah dapatnya banyak. Intinya memang sudah memang begitu jadi *wong* [orang] laut. Berhadapannya sama ombak. Kalau saya sih *nggak* ke laut di sini aja. Ngurus rumah sama *ngewiwi*" (Ibu R, istri nelayan rajungan 2022, wawancara Agustus).

Isu perubahan iklim bagi istri nelayan rajungan Karangantu bukanlah hal baru. Mereka sudah terbiasa bersiasat untuk menabung dan mengelola modal finansial yang dimiliki sebaik mungkin. Ketidakpastian aktivitas melaut sudah menjadi makanan sehari-hari bagi nelayan dan keluarganya, termasuk para perempuan. Ketika para nelayan (suami) atau anak laki-laki mereka pulang melaut dengan sedikit atau tanpa hasil, para perempuan inilah yang akan menggunakan modal sosial mereka, yaitu relasi patron-klien dengan para bos untuk menanggulangi kebutuhan mereka dengan 'hutang moral' yang terus-menerus dipelihara. Pada konteks ini, relasi dengan para bos menjadi jaring pengaman bagi para istri nelayan untuk menyambung hidup pada masa-masa paceklik.

"Waktu banyak ya banyak (hasil melaut), tapi kalau sedikit ya memang tidak ada. Kita minjem sama bos. Kadang

pinter-pinter nyimpan, tapi ya gitu *Nong*, orang nelayan *mah* habis aja terus" (Ibu N, istri nelayan rajungan 2022, wawancara September).

Perubahan iklim bagi istri nelayan rajungan adalah bagian dari 'pasang surut' modal alam yang mereka miliki. Laut yang memberi dan laut yang 'tidak' memberi. Ada saatnya para perempuan ini mendapatkan modal finansial yang cukup hingga layak saat *along* (panen raya hasil tangkapan). Ada kalanya ketidakpastian cuaca menimbulkan masa-masa *seret* (paceklik) yang mengharuskan perempuan 'maju' dan bersiasat, mengerahkan modal sosial yang mereka miliki untuk memastikan kebutuhan keluarganya tetap terpenuhi. Meskipun tidak pernah diperhitungkan—karena tidak dianggap sebagai nelayan—para istri nelayan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga dinamika kelangsungan hidup komunitas pesisir Karangantu.

Ekofeminisme dan Ragam Modal Perempuan Menghadapi Perubahan Iklim

Isu subordinasi yang terkait dengan perubahan iklim dapat dijelaskan dengan teori ekofeminisme yaitu teori sekaligus gerakan etika yang mendobrak antroposentrisme. Sudut pandang antroposentrisme cenderung lebih mengutamakan manusia daripada alam. Ekofeminisme juga melawan model pendekatan androsentrisme yaitu teori etika yang berpusat pada laki-laki. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa dominasi laki-laki terhadap alam dan perempuan memunculkan krisis ekologi dan krisis kemanusiaan yang parah. Maka dari itu, ekofeminisme hadir sebagai gerakan yang diidentifikasi dengan kaum perempuan yang memiliki tugas khusus yang harus dilakukan dalam masa-masa yang menyakitkan akibat kerusakan alam (Shiva & Mies 2014).

Pemikiran ekofeminisme mulai dibicarakan sejak kisaran tahun 1974, kemudian berkembang ketika Shiva (1989) dalam tulisannya menyatakan bahwa perempuan mampu memobilisasi pertahanan untuk lingkungan. Sundberg (2015) menyatakan lebih lanjut bahwa isu ekologis tidak dapat dipisahkan dari relasinya dengan ekonomi politik dan sebaliknya. Ketiganya saling berkaitan dan didirikan atas relasi gender antara laki-laki dan perempuan, terutama menunjuk pada hubungan antara penindasan perempuan dan eksploitasi alam.

Pada konteks Indonesia, tulisan Indirastuti & Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa intervensi ekosistem lahan kering di Kalimantan pada dasarnya membuat perempuan tercerabut dari ruang hidup. Hal ini terlihat

dari sulitnya mendapatkan sumber air dan pangan. Akibatnya, memaksa perempuan mengambil alih peran kepala keluarga karena laki-laki bermigrasi dan mengalami subordinasi berupa tidak selalu diakui perannya sebagai kepala keluarga. Perempuan juga mengalami pemiskinan karena kehilangan kemandiriannya dan harus bekerja sebagai buruh sawit.

Sudut pandang subordinasi dalam perspektif ekofeminisme pada tulisan ini dielaborasi dengan kaitannya terhadap modal yang dimiliki oleh perempuan, khususnya perempuan di perdesaan Indonesia dalam rangka menghadapi perubahan iklim. Ellis (1999) menyatakan setidaknya terdapat lima kategori modal yang dimiliki rumah tangga perdesaan dalam upaya pemenuhan kebutuhan, yaitu: modal manusia, modal finansial, modal alam, modal sosial, dan modal fisik. Strategi resiliensi rumah tangga tidak terpisah dari kombinasi modal-modal tersebut. Modal manusia misalnya merupakan modal yang dimiliki individu atau kelompok yang merupakan sumber daya manusia seperti tenaga kerja dan keahlian tertentu dalam pemenuhan kebutuhan. Contoh modal manusia adalah tenaga kerja pertanian, kemampuan mengidentifikasi bahan pangan dan obat yang dimiliki oleh perempuan pada komunitas.

Modal finansial adalah kepemilikan atas sejumlah aset yang berkaitan dengan keuangan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan, seperti uang, tabungan, dan pinjaman. Pada konteks perdesaan dan perempuan, modal ini dapat berbentuk simpanan uang, perhiasan, tabungan (Lawalu & Goba 2020) hingga warisan peninggalan orang tua yang dapat diuangkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga ataupun keinginan. Perempuan di beberapa desa misalnya berdasarkan tradisi akan dibekali oleh orang tuanya ketika akan berumah tangga. Bekal ini entah dalam bentuk emas, perhiasan, atau ternak yang dapat diwariskan kembali atau diuangkan pada saat mendesak.

Modal alam adalah akses manusia terhadap faktor biotik dan abiotik di sekitarnya yang memberikan manfaat atas akses bahkan kepemilikan atas modal tersebut. Pada konteks perdesaan, ketersediaan mata air yang dapat diakses perempuan di sekitar tempat tinggalnya untuk kebutuhan sehari-hari atau naungan hutan atau pesisir pantai yang kaya akan sumber pangan di sekitar tempat tinggal (Situmeang et al. 2019), dapat digolongkan dalam kelompok modal alam.

Modal sosial merupakan gabungan atas relasi sosial yang memungkinkan individu atau kelompok memiliki kekuatan bersama. Terdapat banyak teori tentang

modal sosial, seperti Coleman (1988) dan Siisiäinen (2020) yang mengaitkan antara tindakan dan perilaku aktor dalam struktur sosial berdasarkan modal sosial yang terjalin. Pada konteks pengalaman perempuan, modal sosial ini dapat berupa relasi dalam keluarga besar, arisan, eksistensi kelompok perempuan, dan sebagainya yang menjadi jaring pengaman bagi pemenuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya (Puspitasari 2015; Mozumdar 2017; Handayani 2019; Osei & Zhuang 2020). Modal sosial berdiri di atas dasar kepercayaan (*trust*) dan menyusun jejaring sosial antar aktor yang tergabung di dalamnya.

Modal terakhir adalah modal fisik. Modal ini berwujud dalam bentuk bangunan fisik yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, misalnya bangunan sarana dan prasarana. Beberapa contoh di antaranya adalah jalanan, saluran air, ruang terbuka hijau, bendungan, lahan pertanian (Purwaningsih 2021), dan bangunan fisik lainnya yang menjadi alat atau sarana pendukung terpenuhinya kebutuhan individu atau komunitas. Pada konteks perdesaan misalnya, adanya jalan tani yang memudahkan perempuan melakukan aktivitas *on farm*, saluran air, penerangan jalan desa, hingga ruang pertemuan yang dapat digunakan untuk berkumpul.

Pengalaman yang diperoleh para mama di Kabupaten Sumba Timur dan para perempuan istri nelayan di Karangantu, Kota Serang mencerminkan pengalaman perempuan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim. Posisi tawar mereka yang cenderung stagnan berada pada bayangan laki-laki menyebabkan kontribusi dan ragam modal yang dikombinasikan dalam rangka menghadapi perubahan iklim cenderung tidak diperhitungkan. Perubahan ekosistem tanaman pangan lokal di Sumba Timur yang membuat produksi pangan menjadi rentan ketika menghadapi perubahan iklim, memaksa para mama menanggung beban ganda dan tidak memperoleh pengakuan bahwa merekalah yang pada akhirnya menopang kehidupan rumah tangga. Absennya pengakuan ini tercermin dari intervensi ekologis yang tidak melibatkan para mama dalam pengambilan keputusan pembangunan. Para mama membuat jalan bagi mereka sendiri melalui modal-modal yang dapat mereka akses. Gerakan yang dilakukan oleh para mama ini adalah bagian dari gerakan ekofeminisme yang membuat perempuan berupaya melawan perubahan iklim dan diperparah oleh kebijakan pemerintah yang gagap menata agroekosistem.

Para perempuan istri nelayan di Karangantu juga merupakan aktor kunci yang mengelola mayoritas

modal rumah tangga untuk bertahan menghadapi ketidakpastian datangnya musim *along* dan paceklik. Curahan waktu dan tenaga mereka *mewiwil* dipandang sebagai pekerja keluarga tanpa bayaran meskipun mayoritas waktu mereka habis untuk *mewiwil*. Tanpa bantuan perempuan dalam *mewiwil*, nelayan (laki-laki) tidak akan dapat tepat waktu mempersiapkan jaring rajungan untuk berangkat melaut pada saat cuaca cukup baik.

Strategi yang dilakukan oleh para perempuan istri nelayan merefleksikan bagaimana ekofeminisme

menjadi laku hidup. Pada wujud yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para mama, perempuan istri nelayan memahami betul ritme alam—karena kedekatannya dengan kerja-kerja domestik dan alam—dalam memberikan hasil tangkapan yang ‘berlebih’ dan ‘kurang’. Perempuan istri nelayan tidak menggunakan wadah kelompok sebagai kendaraan untuk perlawanannya. Mereka berhasil memobilisasi modal-modal yang mereka miliki di sekitar komunitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa-masa yang penuh ketidakpastian akibat perubahan iklim.

Tabel 1. Modal yang dimiliki komunitas perempuan dalam menghadapi perubahan iklim

Modal	Modal yang dimiliki & Strategi	
	Kasus Kabupaten Sumba Timur ²	Kasus Karangantu, Kota Serang ³
Manusia	Keterampilan dan pengetahuan menenun. Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan dalam kelompok perempuan	Keterampilan <i>mewiwil</i> . Sumber daya manusia cenderung tidak mengalami peningkatan kapasitas, tidak terdapat penguatan modal manusia secara komunal.
Finansial	Membentuk tabungan kelompok	Menyimpan sedikit kelebihan hasil melaut ketika <i>along</i> (panen raya) dalam bentuk tabungan untuk masa paceklik
Alam	Tersedianya plasma nutfah tanaman pangan lokal yang relatif tahan perubahan iklim. Menanami lahan pekarangan dan masuk ke hutan sebagai lokasi pencadangan pangan lokal untuk musim lapar	Laut menyediakan rajungan yang dapat ditangkap sebagai pendapatan rumah tangga nelayan, meskipun terdapat fluktuasi hasil tangkapan akibat perubahan iklim
Sosial	Bergabung dalam kelompok perempuan Tapawallabadi	Memelihara ikatan patron klien dengan bos (pengepul), memanfaatkan ikatan kekerabatan sebagai jaring pengaman.
Fisik	Tidak terdapat modal fisik yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan dampak perubahan iklim	Tidak terdapat modal fisik yang secara langsung berkaitan dengan penanggulangan dampak perubahan iklim

Sumber: diolah oleh penulis dari data primer

Di samping itu, kasus-kasus ragam modal perempuan perdesaan yang telah disebutkan juga dapat ditelaah melalui beberapa poin *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni *no poverty*, *zero hunger*, *gender equality*, dan *climate action*. Usaha-usaha perempuan yang kerap mencari sumber nafkah lain di tengah ketidakpastian iklim bertujuan untuk melepaskan ia dan keluarganya dari jerat kemiskinan (*no poverty*). Meskipun demikian, kondisi ini membuat para perempuan menanggung beban ganda karena perempuan cenderung menetap di tempat tinggal asalnya untuk mengurus anak-anak di sela waktu kerja sedangkan kaum lelaki cenderung mencari sumber nafkah baru di wilayah lain saat sumber nafkah utamanya tak bisa lagi diandalkan akibat perubahan

iklim. Beban ganda ini merupakan problem yang sulit dihilangkan mengingat pemahaman masyarakat yang masih menganggap bahwa mengurus keluarga adalah tugas utama perempuan dan belum menerapkan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, dalam poin kedua SDGs yakni *zero hunger*, perempuan dalam kasus-kasus yang telah disebutkan berupaya mencari alternatif sumber nafkah untuk menghindarkan keluarganya—terutama anak-anak yang masih kecil—dari kelaparan. Perempuan perdesaan yang tidak mendapatkan nafkah rutin dari suami yang bekerja di luar kota harus memutar otak agar pendapatan dari mata pencaharian alternatif yang dilakukannya cukup untuk membeli makanan pokok

sehari-hari. Poin SDGs selanjutnya yakni poin kelima SDGs yang menekankan *gender equality*. Sebagai tema besar studi ini, kesetaraan gender merupakan kondisi ideal yang harus dicapai agar perempuan terlepas dari beban ganda. Banyak hal yang harus dikorbankan seorang perempuan agar keluarganya tetap bertahan hidup di tengah ketidakpastian iklim yang memengaruhi sumber nafkah. Oleh karenanya, pemahaman masyarakat akan pembagian peran yang baik dalam keluarga terutama dalam mengurus anak harus mendapat perhatian yang lebih serius dari pemerintah agar perempuan tidak harus selalu mengalami subordinasi.

Poin terakhir dalam SDGs yang erat kaitannya dengan modal perempuan perdesaan adalah poin ketiga belas yang menekankan tentang *climate action*. Krisis iklim yang dihadapi di abad ke-21 ini merupakan salah satu isu lingkungan utama yang membutuhkan kerja sama antarnegara. Berbagai skema untuk mengurangi pemanasan global telah dirumuskan, namun pada kenyataannya, kebutuhan industri selalu mengalahkan kepentingan lingkungan. Sebagai kaum yang sangat rentan akan krisis iklim tersebut, perempuan perdesaan harus mendapatkan *safety net* tambahan dari pemerintah agar kebutuhan hidup utama mereka dan keluarga tetap terpenuhi.

Berdasarkan pengalaman perempuan perdesaan, baik pada konteks pertanian dan pesisir tersebut, maka terlihat jelas bahwa peran perempuan berkaitan erat dengan upaya memobilisasi ragam modal yang dimiliki untuk menghadapi tantangan perubahan iklim sebagai akibat intervensi ekosistem atas nama pembangunan. Upaya pelestarian pangan lokal oleh para mama merupakan gerakan ekofeminisme yang dihimpun dalam wadah kelompok sosial. Sementara itu, perempuan istri nelayan di Karangantu adalah dengan memobilisasi modal-modal yang dapat mereka akses pada komunitas nelayan. Kedua pendekatan ini sedikit banyak telah berkontribusi nyata dalam upaya pencapaian SDGs pengentasan kemiskinan, kelaparan, pengupayaan kesetaraan gender melalui ruang aman bagi para perempuan untuk menghimpun kekuatan bersama baik melalui kelompok maupun dalam komunitas.

Penutup

Perubahan iklim telah terang-terangan berdampak pada perdesaan di Indonesia. Fenomena ini membuat rumah tangga petani terdampak tidak hanya secara fisik namun juga situasi sosial. Pengalaman perempuan di perdesaan pulau Jawa dan Nusa Tenggara Timur dalam

menghadapi tantangan perubahan iklim. Pada tulisan ini, perjuangan ekofeminisme tidak terlepas dari konteks intervensi ekosistem, politik dan ekonomi yang tidak menempatkan perempuan setara sebagai aktor yang berperan signifikan melalui pengelolaan ragam modal—sekaligus kelompok yang paling rentan menerima dampak dari perubahan iklim karena konstruksi gender.

Subordinasi perempuan perdesaan di Indonesia adalah situasi nyata yang terjadi hingga saat ini. Penanganan perubahan iklim yang bias patriarki hanya memperparah subordinasi yang dialami oleh perempuan. Kisah perempuan di Sumba Timur yang menyiasati perubahan iklim dan melawan subordinasi atas keputusan patriarki dalam sesat pikir pembangunan, dilakukan dengan memperkuat modal sosial melalui penguatan kelompok perempuan. Kisah para istri nelayan di Banten kembali menunjukkan bahwa subordinasi yang mereka alami tidak menjadi penghalang untuk mengambil peran strategis menghadapi ketidakpastian cuaca. Para istri nelayan rajungan memiliki peran signifikan dengan pemanfaatan modal sosial, walau mereka cenderung tidak dipertimbangkan dan mendapat akses penguatan modal finansial, modal manusia, dan modal fisik.

Refleksi yang diperoleh dari kisah-kisah para perempuan menghadapi perubahan iklim yang memberi gambaran pada konteks masyarakat pertanian darat dan konteks masyarakat pesisir tersebut adalah subordinasi sebagai salah satu akar permasalahan pengambilan keputusan dalam strategi pembangunan menghadapi perubahan iklim yang bias. Pada akhirnya, keputusan-keputusan pembangunan yang meminggirkan dan tidak mempertimbangkan situasi perempuan, malah memperumit pemenuhan kebutuhan rumah tangga di perdesaan.

Pengalaman perempuan perdesaan dari berbagai kajian yang telah dipaparkan di atas, baik pada ekosistem pertanian maupun pesisir menunjukkan bahwa dibutuhkan perbaikan mendasar atas pemahaman bahwa sumbangsih peran perempuan dalam menopang masyarakat menghadapi perubahan iklim sangat signifikan. Ketidakadaan rencana mitigasi dan penanggulangan iklim yang responsif gender, serta penyelenggaraan ruang-ruang pendidikan berbasis gender dalam menghadapi perubahan iklim perlu diinisiasi.

Daftar Pustaka

Al Farisi, M.S. & Alfirdaus, L.K. 2020. Krisis Iklim, Gender, dan Kerentanan: Potret Perempuan Petani di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. *Journal of Politic and Government Studies*, 9(04), hlm.

369—385. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/28856>.

Akbar, T. et al. 2017. "Nelayan, Lingkungan, dan Perubahan Iklim (Studi Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pesisir di Kabupaten Malang)", *WAHANA*. 68. 10.36456/wahana.v68i1.630.

Arifah et al. 2021. "Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga: Sebuah Analisis Gender", *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan*, diakses 13 Oktober 2022 di <https://ojs.polipangkep.ac.id/index.php/proppnp/issue/view/4>.

Arham, I. & Adiwibowo, S. 2022. "Pengaruh Kemarau Panjang 2019 Sebagai Indikasi Perubahan Iklim Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Desa Tenajar Kidul, Indramayu", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 6(1), 86—100. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v6i1.960>.

Banjarnahor, D. & Simanjuntak, B.H. 2016. "Evaluasi Kesesuaian Lahan Sumba Tengah untuk Tanaman Pangan serta Perancangan Pola Tanamnya yang Spesifik Lokasi", *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 16 No. 2, Agustus 2016, hlm. 108—118.

Coleman, J.S. 1988. "Social Capital in the Creation of Human Capital", *American Journal of Sociology*, 94, S95—S120. <http://www.jstor.org/stable/2780243>.

Darmawan et al. 2021. "Partisipasi Nelayan dalam Memanfaatkan Pengolahan Kerang Hijau di Desa Tanggul Karangantu Banten", *Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Serang Volume 4*, diakses pada 13 Oktober 2022 di <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/download/849/858>.

Darmawati, E.S. 2019. *Strategi Perempuan dalam Menghadapi Perubahan Iklim Melalui Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo*, Universitas Brawijaya, Malang.

Dewy, P. & Umar, R. 2020. "Kebijakan Iklim Nasional (Masih Tetap) Belum Responsif Gender", *Aksi! For gender, social and ecological justice*, diakses pada 13 Oktober 2022 di <https://aksiforjustice.org/files/report/2022/May/629042531680e.pdf>.

Dewy, P. et al. 2012. *Inisiatif Perempuan Menghadapi Skema Kebijakan Iklim*, Solidaritas Perempuan, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim 2017, "Tentang Perubahan Iklim", *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*, diakses 13 Oktober 2022. <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/>.

Ellis, F. 1999. "Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries: Evidence and Policy Implications", *Natural Resource Perspective*, Number 40, https://www.researchgate.net/publication/42765249_Rural_Livelihood_Diversity_in_Developing_Countries_Evidence_and_Policy_Implications.

Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handayani, B.L. 2019, "Memperkuat Modal Sosial Perempuan Dalam Menghadapi Bencana", *Journal Of Urban Sociology* 1, 16. Doi:10.30742/Jus.V1i1.561.

Indirastuti, C. & Pratiwi, A. 2019, "Ketika Lahan Basah Mengering: Kajian Ekologi Politik Feminis Degradasi Ekosistem Gambut di Kalimantan Tengah dan Selatan", *Jurnal Perempuan* Vol. 24 No. 4, November, DOI:10.34309/jp.v25i1.412.

Jumiati, I.E. 2018. "Analisis Evaluasi Program Pemberdayaan Nelayan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang", *Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies (JIPAGS)*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2018, hlm. 42—59.

Kaho, N.R. 2021. "Perubahan Iklim, Bencana & Nusa Tenggara Timur", *ResearchGate*, diakses pada 13 Oktober 2022 di https://www.researchgate.net/profile/Norman_Riwu_Kaho/publication/320700787_Dampak_Perubahan_Iklim_bagi_Pertanian_Di_Provinsi_Nusa_Tenggara_Timur_Alternatif_Solusi_Adaptasi_Melalui_Sintesis_Informasi/links/59f5aaf0458515547c21e385/Dampak-Perubahan-Iklim-bagi-Pertanian-Di-Provinsi-Nusa-Tenggara-Timur-Alternatif-Solusi-Adaptasi-Melalui-Sintesis-Informasi.

Killa, Y. 2021. "Identifikasi kesesuaian lahan tanaman pangan di Kecamatan Ngaha Ori Anggu, Kabupaten Sumba Timur", *Agrovigor: Jurnal Agroekoteknologi*, 14(2), hlm. 138—144. doi:<https://doi.org/10.21107/agrovigor.v14i2.9069>.

Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan 2013, *Desa Mandiri Pangan Menuju Desa Sejahtera: Model Partisipasi dan Kolaborasi Mewujudkan Kedaulatan Pangan* (tidak diterbitkan).

KPPPA. 2022. "Glosary Ketidakadilan Gender", *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, diakses 13 Oktober 2022 di <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/view/23>.

KPPPA. 2015. *Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta.

Latifa, A. & Fitranita 2013. "Strategi Bertahan Hidup Perempuan dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim", *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 8 No. 1, hlm. 53—63.

Lawalu, E.M. & Goba, M.K. 2020. "Partisipasi Perempuan Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga Sebelum dan Setelah Adanya Covid-19", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 5(3), hlm. 21—30, <http://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/658/397>.

Mayastuti, A. & Sari, D. 2016. "Membangun Ketahanan Masyarakat Berbasis Gender Melalui Adaptasi Perubahan Iklim", *JOLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 4 No. 2: Oktober. DOI: 10.20961/jolsic.v4i2.50494.

Mulia, M. 2022. "Feminisme Islam di Indonesia: Refleksi, Aksi, dan Praxis", *Jurnal Perempuan* Vol. 27 No. 2, Agustus 2022, hlm. 167—178.

Mozumdar, L. et al. 2017. "Relevance of social capital in women's business performance in Bangladesh", *Journal of the Bangladesh Agricultural University*, Vol. 15, hlm. 87—94. DOI:10.3329/jbau.v15i1.33533.

Oru, S. 2013. "Ketahanan Pangan Dan Strategi Livelihood Masyarakat Desa Prai Paha", *Skripsi*, Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Osei, C.D. & Zhuang, J. 2020. "Rural Poverty Alleviation Strategies and Social Capital Link: The Mediation Role of Women Entrepreneurship and Social Innovation", *SAGE Open*, Volume 10, Issue 2, April-June 2020. DOI:10.1177/2158244020925504.

PBB. 2022. "Apa Itu Perubahan Iklim?", *Perserikatan Bangsa Bangsa Indonesia*, diakses 13 Oktober 2022, <https://indonesia.un.org/id/172909-apa-itu-perubahan-iklim>.

Purwaningsih, V.T. 2021, "Perempuan dan Kesejahteraan Rumah Tangga Sektor Informal di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1), hlm. 43–54. <https://doi.org/10.52813/jei.v10i1.61>.

Puspitasari, D.C. 2015, "Modal Sosial Perempuan Dalam Peran Penguatan Ekonomi Keluarga", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, 69. DOI:10.22146/jps.v1i2.23445.

Ramadhani, F. & Hubeis, A. 2020, "Analisis Gender dalam Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Rumah Tangga Pertanian", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 4 No. 2, hlm. 155—166.

Shiva, V. & Mies, M. 2014. *Ecofeminism*, Zed Books, New York.

Shiva, V. 1988, *Staying Alive: Women, Ecology and Survival in India*, Indraprastha Press, New Delhi.

Siisiäinen, M. & Martti 2000, "Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam", *The University of Zurich*, diakses pada 13 Oktober 2022 di <https://www.suz.uzh.ch/dam/jcr:ffffff-df42-7cac-ffff-ffffbdccdaaa/siisiainen.pdf>.

Situmeang, W.H. et al. 2019. "Reality Of Gender Relations: The Role And Position Of Workers In The Maritime And Fisheries Sector", *Jurnal Partisipatoris*, 1(2), hlm. 107–116. DOI: 10.22219/Jp.V1i2.8571.

Sundberg, J. 2015. "Feminist Political Ecology", *The International Encyclopedia of Geography*, Wiley- Blackwell & Association of American Geographers.

Sunarti, S. & Apriliasari, N. 2015. "Dampak Perubahan Iklim Terhadap Permukiman Pesisir di Kelurahan Demaan Kabupaten Jepara", *TATALOKA*, Volume 17, Nomor 4, November, hlm. 248—256. DOI: 17.248. 10.14710/tataloka.17.4.248-256.

Wasti, N.M. 2017. "Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG)", *Jurnal Sunari Penjor* Vol. 1 No. 1. September 2017.

Catatan Akhir

- 1 Istilah yang digunakan oleh komunitas nelayan Karangantu. Dimaknai sebagai aktivitas membenahi jaring yang rusak pasca digunakan untuk menangkap rajungan atau ikan.
- 2 Data primer dikumpulkan pada tahun 2019—2020.
- 3 Data primer dikumpulkan pada tahun 2022.

